

**PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI KPU PROVINSI JAMBI**

TESIS

Nama Dosen Pembimbing :

1. **Dr. RONI EKHA PUTERA, M.PA**
2. **Dr. AIDINIL ZETRA, MA**



Oleh :

PRENADIA PARAMITA

BP. 1920832015

**PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**

2021

PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

DI KPU PROVINSI JAMBI

TESIS

Diajukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Magister Ilmu Politik

pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Andalas



PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

2021

ABSTRAK

Nama : Prenadia Paramita
Program Studi : Tata Kelola Pemilu
Judul : Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di KPU
Provinsi Jambi

Akuntabel (*accountabel*) merupakan salah satu unsur terwujudnya sebuah Pemilu berintegritas. Aspek akuntabel juga merupakan prinsip terciptanya *good goverment* dalam penyelenggaraan pemerintah dimana salah satu indikatornya adalah pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan instansi pemerintah. KPU sebagai penyelenggara pemilu diketahui tercatat sebagai salah satu instansi pemerintah yang masih memperoleh opini WDP atas laporan keuangan untuk tahun 2018 dan 2019. Hal ini menjadi pertanyaan bagaimana penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di KPU. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sangat berkaitan dengan kualitas penyelenggaraan keuangan suatu instansi pemerintah. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisa penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU, dengan lokasi penelitian KPU Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lewat pendekatan studi kasus. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penerapan SPIP di KPU Provinsi Jambi sudah cukup memadai terutama dalam unsur informasi dan komunikasi. Sedangkan, unsur SPIP lainnya yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, dan pemantauan masih memiliki kelemahan. Dalam unsur lingkungan pengendalian ditemukan kelemahan dalam penerapan subunsur penegakan integritas dan nilai Etika, subunsur pembentukan struktur organisasi yang sesuai kebutuhan, dan subunsur penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia. Pada unsur penilaian risiko terdapat kelemahan dalam kegiatan identifikasi resiko. Sedangkan unsur kegiatan pengendalian terdapat kelemahan pada kegiatan pembinaan sumber daya manusia masih belum memadai dan kegiatan dokumentasi atas sistem pengendalian intern. Dan yang terakhir, unsur pemantauan masih terdapat kelemahan yaitu APIP yang belum memiliki sumber daya, kemampuan, dan independensi yang memadai.

Kata kunci : Pengendalian Internal, SPIP, KPU.

ABSTRACT

Name : Prenadia Paramita
Study Program : Election Governance
Title : Implementation of the government's internal control system at KPU Provinsi Jambi

Accountability is one element in the realization of an election with integrity. The accountable aspect is also the principle of creating good governance in the administration of government where one of the indicators is the provision of Unqualified Opinion (WTP) on the financial statements of government agencies. The KPU as an election organizer is known to be listed as one of the government agencies that still obtains WDP opinions on financial reports for 2018 and 2019. This is a question of how to implement the Government Internal Control System (SPIP) at the KPU. The application of the Government Internal Control System (SPIP) is closely related to the quality of financial administration of a government agency. This study intends to analyze the implementation of the Government's Internal Control System in the KPU, with the research location of the KPU in Jambi Province. This study uses a qualitative method through a case study approach. From the results of the study, it was concluded that the implementation of SPIP at KPU Jambi Province was sufficient, especially in the elements of information and communication. Meanwhile, other elements of SPIP, namely the control environment, risk assessment, control activities, and monitoring still have weaknesses. In the elements of the control environment, weaknesses were found in the application of the sub-elements of upholding integrity and ethical values, the sub-elements of forming an organizational structure that was appropriate to the needs, and the sub-elements of preparing and implementing sound policies on human resource development. In the element of risk assessment there are weaknesses in risk identification activities. Meanwhile, the elements of control activities have weaknesses in human resource development activities which are still inadequate and documentation activities on the internal control system. And lastly, the monitoring element still has weaknesses, namely APIP that does not yet have adequate resources, capabilities, and independence.

Keywords: Internal Control, SPIP, KPU